PENDAMPINGAN PENYUSUNAN PROPOSAL DANA KOLABORASI KAB. MANNA

M. Sang Gumilar

Program Studi Teknik Sipil; Sekolah Tinggi Teknologi Pagaralam (STTP)
Jl. M. Siagim No. 75. Karang Dalo, Dempo Tengah, Kota Pagar Alam
Telp/Fax: (0730) 621916

e-mail: sang_gumilar@gmail.com

Abstrak

Beberapa proyek membutuhkan dana untuk bisa diwujudkan. Tetapi dengan spirit kolaborasi, terkadang dana yang dibutuhkan bisa diminimalisir. Perbaikan pada sistem pendanaan harus segera dilaksanakan. Peningkatan jumlah pendanaan tersebut diharapkan dapat memberikan pengaruh pada hasil dan kualitas. Hasil dari adanya dana kolaborasi akan dapat menunjang pembangunan di setiap wilayah. Pemberian dana kolaborasi dan penunjukan lokasi sasaran. Banyak permasalahan permukiman di daerah ini, seperti masalah akses jalan untuk mobilisasi masyarakat, masalah drainase, air bersih, bahkan rawan longsor. Selain itu, misalnya pada perumahan permukiman terdapat indikator kumuh, yakni keteraturan bangunan, jalan lingkungan, drainase, pembuangan air limbah rumah tangga, penyediaan air minum, pengelolaan persampahan dan pengamanan bahaya kebakaran. Pemberian dana kolaborasi berpatokan pada luas kekumuhan. Dengan adanya dana kolaborasi memberikan dampak positif bagi pembangunan, dapat berjalan sesuai dengan tujuan pembangunan. Dana kolaborasi dapat memberikan kesejahteraan bagi masyarakat untuk mewujudkan pembangunan infrastruktur disekitar masyarakat

Kata kunci— *Proyek, Pendanaan, Lokasi, Kumuh, Rumah, Dana.*

1. PENDAHULUAN

Sebagai upaya mendapatkan pembelajaran perencanaan dari Program Perkotaan, Penataan Lingkungan Berbasis Komunitas, Pengembangan Penghidupan Masyarakat Berbasis Komunitas, serta Program Selaras dan Pendampingan Kelompok Swadaya Masyarakat, pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), didukung oleh Bank Dunia, menyelenggarakan Lokakarya Pembelajaran Perkotaan dan Kolaborasi Perencanaan Permukiman Tingkat. Pengembangan Kawasan Permukiman Berbasis Masyarakat dilakukan dengan penanganan kumuh dengan strategi berikut. Pertama, pendampingan penyusunan Raperda tentang pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Kedua, pendampingan penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP). Ketiga, pendampingan penyusunan RP2KPKP. Keempat, program penanganan kumuh berbasis masyarakat—Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU)—dengan revitalisasi peran BKM dari penanggulangan kemiskinan ke penanganan kumuh.

Dalam program kegiatan tersebut terdapat beberapa kegiatan yaitu kolaborasi dengan semua stakeholder di kabupaten/kota masing-masing termasuk kolaborasi kegiatan melalui alokasi dana desa dan sumber dana lainnya yang masuk ke desa sebagai upaya penanganan kumuh, mendukung regulasi di daerah terkait dengan kebijakan pemerintah dalam pencapaian target 100-0-100, pembagian kewenangan antara pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten /kota dan Pemda dalam upaya pencegahan penanganan dan serta peningkatan kualitas permukiman kumuh dalam rangka mewujudkan target 100-0-100, membentuk tim perencanaan dan forum koordinasi di tingkat kabupaten/kota dan gampong yang melibatkan perwakilan laki-laki dan perempuan dari semua unsur dan memastikan keterlibatan BKM dan TIPP ke dalam tim perumus RPJMG, sinkronisasi waktu penyusunan RPLP dan RPJMG, menyepakati data baseline 100-0-100 masuk dalam RPJMG dan melakukan publikasi RPJMG kepada masyarakat.

2. METODE

Teknik yang digunakan dalam penyampaian materi pendampingan adalah workshop, dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, LCD.

2.1 Metode

Teknik yang digunakan dalam penyampaian materi pendampingan adalah workshop, dengan menggunakan alat bantu berupa laptop, LCD.

2.2 Materi

Dalam melakukan perencanaan ada target yang harus dilakukan yaitu berikut adalah upaya yang harus dilakukan:

1. Perubahan Perilaku

- a) Membangun pemahaman konsultan sebagai katalisator
- b) Membangun kolaborasi yang di mulai dari lingkungan konsultan sendiri,
- c) Membangun pemahaman konsultan terhadap esensi penanganan kumuh
- d) Memfasilitasi ketersediaan sumber dana untuk pembiayaan program dari Pemda maupun sumber dana lain
- e) Melakukan advokasi lahirnya kebijakan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam mendukung penanganan kumuh
- f) Penguatan tugas pokok dan fungsi sesuai bidang keahlian berorientasi pada penanganan kumuh di lokasi dampingan

2. Membangun Kolaborasi

- a) OC/OSP/RMC bersama Korkot dan *City Coordinator* wajib melakukan advokasi, koordinasi; pendekatan kepada Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta stakeholders sehingga kolaborasi dalam penanganan kumuh mendapat dukungan yang kongkrit dan dapat berjalan efektif
- b) OC/OSP/RMC bersama Korkot dan *City Coordinator* memastikan pemerintah kabupaten/kota memiliki komitmen untuk pemeliharaan dan pengembangan asset setelah dilakukan serah terima asset dari pelaksana kegiatan kepada pemerintah kabupaten/kota;
- c) Mengoptimalkan potensi lembaga-lembaga di daerah untuk kegiatan penguatan kapasitas yang mendukung penanganan kumuh, seperti perguruan tinggi, lembaga-lembaga diklat, BLK, dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- d) Memanfaatkan event sosialisasi bersama seperti uji public dan forum konsultasi digunakan untuk membangun kolaborasi.

3. Memerankan pemerintah daerah sebagai Nakhoda

- a) Memberikan pemahaman kritis terhadap pemerintah provinsi dan kabupaten/kota bahwa Kumuh adalah masalah bersama, sehingga OC/OSP/RMC bersama Korkot dan *City Coordinator* mendorong pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mengalokasikan sumber daya untuk menyelesaikan persoalan penanganan kumuh.
- b) Pemerintah kabupaten/kota adalah pemilik dokumen perencanaan penanganan kumuh, sehingga OC/OSP/RMC bersama Korkot dan *City Coordinator* mendorong peran Pemerintah kabupaten/kota dalam proses penyusunan dokumen perencanaan yang komprehensif.
- c) Melakukan advokasi terhadap Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota yang belum memiliki konsep dan strategi dalam pengembangan kapasitas di daerahnya untuk mendukung target penanganan kumuh yang bersifat komprehensif.
- d) Melakukan advokasi terhadap Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar persoalan penanganan kumuh dan target pengurangan kumuh dapat masuk dalam RPJMD.
- e) Mengawal alokasi anggaran penanganan kumuh dalam APBD 2017 agar dapat direalisasikan serta melakukan advokasi terhadap Pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk menganggarkan kegiatan penanganan kumuh dalam RAPBD 2018.

4. Revitalisasi BKM

- a) Meningkatkan kapasitas pengurus BKM/LKM dan pengelola UP-UP, serta memperkuat kelembagaan BKM /LKM secara legalitas hukum sehingga BKM berorientasi kepada upaya pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman di tingkat kelurahan/desa
- b) Melakukan advokasi kepada BKM/LKM agar lebih intensif melakukan koordinasi dan konsolidasi dengan Lurah/kepala desa agar RPLP dapat masuk dan terakomodir dalam sistem perencanaan daerah
- c) Memastikan BKM/LKM tetap memelihara dan mengoptimalkan pemanfaatan komputer untuk keperluan perencanaan kegiatan, pelaksanaan kegiatan dan pelaporan kegiatan
- d) OC/OSP/RMC bersama Korkot dan *City Coordinator* memastikan berjalannya keberlanjutan BKM/LKM terkait dengan Pemilu BKM/LKM, penilaian perkembangan kelembagaan BKM/LKM, dan rembug warga tahunan

5. Keterpaduan program NSUP dan NUSP2

- a) Melakukan koordinasi dan konsolidasi kegiatan dan rencana kegiatan konsultan NSUP dan NUSP-2 mulai tingkat nasional, provinsi dan kota/kabupaten, dan kelurahan karena penanganan permasalahan kumuh tidak dapat berjalan sendiri dan tidak dapat disamakan di semua lokasi.
- b) Melakukan sinkronisasi dan keterpaduan data lapangan serta pemanfaatan dokumen perencanaan
- c) Membuat kesepakatan bersama antara konsultan pendamping NSUP dan NUSP-2 dalam melakukan fasilitasi dan advokasi penyusunan strategi penanganan kumuh bersama dalam satu Kabupaten/Kota.
- d) Menyusun peta keterpaduan program penanganan kumuh pada level kelurahan/lingkungan dan kabupaten/kota

2.3. Penyelesaian Masalah

Koordinasi Team dalam mewujudkan pembangunan program perumahan dan permukiman menyatakan bersedia dan sanggup melakukan perubahan untuk Mewujudkan Permukiman Layak Huni, Produktif & Berkelanjutan sebagai bagian dari upaya mewujudkan Kota milik semua warga, Menjadikan Program Kotaku sebagai *platform* kolaborasi dalam penanganan kumuh; mencapai Target Program.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Hasil

Pelaksanaan pendampingan penyusunan proposal dana kolaborasi memberikan pengetahuan tentang metode yang tepat untuk digunakan dalam aplikasi proses pemanfaatan dana kolaborasi agar tepat sasaran.

3.2. Pembahasan

Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dijelaskan bahwa Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat, sedangkan Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

Karakteristik fisik selanjutnya menjadi dasar perumusan kriteria dan indikator dari gejala kumuh dalam proses identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh. Selain karakteristik fisik, karakteristik non fisik pun perlu diidentifikasi guna melengkapi penyebab kumuh dari aspek non fisik seperti perilaku masyarakat, kepastian bermukim, kepastian berusaha, dsb.

Tujuan Program

Tujuan program adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan.

Pencapaian tujuan program dan tujuan antara diukur dengan merumuskan indikator kinerja keberhasilan dan target capaian program yang akan berkontribusi terhadap tercapainya sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 yaitu pengentasan permukiman kumuh perkotaan menjadi 0 persen

Strategi Operasional

Strategi operasional dalam penyelenggaraan program adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan penanganan kumuh melalui pencegahan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
2. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kelembagaan yang mampu berkolaborasi dan membangun jejaring penanganan kumuh mulai dari tingkat pusat s.d. tingkat masyarakat;
3. Menerapkan perencanaan partisipatif dan penganggaran yang terintegrasi dengan multi-sektor dan multi-aktor;
4. Memastikan rencana penanganan kumuh dimasukkan dalam agenda RPJM Daerah dan perencanaan formal lainnya;
5. Memfasilitasi kolaborasi dalam pemanfaatan produk data dan rencana yang sudah ada, termasuk dalam penyepakatan data dasar (*baseline*) permukiman yang akan dijadikan pegangan bersama dalam perencanaan dan pengendalian;
6. Meningkatkan akses terhadap pelayanan dasar lingkungan yang terpadu dengan sistem kota; Mengembangkan perekonomian lokal sebagai sarana peningkatan penghidupan berkelanjutan;
7. Advokasi kepastian bermukim bagi masyarakat berpenghasilan rendah kepada semua pelaku kunci; dan
8. Memfasilitasi perubahan sikap dan perilaku pemangku kepentingan dalam menjaga lingkungan permukiman agar layak huni dan berkelanjutan.

Cakupan lokasi program berdasarkan kategori kegiatan adalah sebagai berikut:

1. Kegiatan peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan di seluruh kawasan teridentifikasi kumuh yang diusulkan kabupaten/kota. Khusus untuk perbaikan infrastruktur tingkat kota (infrastruktur primer dan sekunder), dukungan investasi dari pemerintah pusat hanya akan diberikan kepada kota/kabupaten terpilih, yang memenuhi kriteria tertentu.
2. Kegiatan pencegahan kumuh dilaksanakan di seluruh kelurahan dan atau kawasan/kecamatan Perkotaan diluar kel/desa kawasan yang teridentifikasi kumuh termasuk lokasi kawasan permukiman potensi rawan kumuh yang diidentifikasi pemerintah kabupaten/kota.
3. Kegiatan pengembangan penghidupan berkelanjutan dilakukan di semua lokasi peningkatan kualitas maupun pencegahan kumuh.

Perencanaan

1. Persiapan perencanaan
2. Penyusunan RP2KP-KP dan RPLP
3. Penyusunan Rencana Detil/Teknis

Pelaksanaan

1. Penganggaran di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten/kota untuk memastikan keterpaduan dan ketersediaan anggaran sesuai dengan rencana investasi yang telah disepakati dalam RP2KP-KP, rencana kawasan, maupun dokumen lainnya. Kegiatan yang akan dilaksanakan, berdasarkan prioritas dari perencanaan penanganan permukiman kumuh tingkat Kab/Kota atau Kelurahan/Desa dengan sumber pembiayaan dari APBN, APBD, swadaya masyarakat dan sumber pembiayaan lainnya yang sah
2. Penyusunan DED, pelelangan, konstruksi, dan supervise kegiatan. Pelaksana kegiatan infrastruktur skala kabupaten/kota secara kontraktual oleh pihak ketiga (kontraktor) dengan

pengadaan barang dan jasa oleh Satker Provinsi, mengacu pada peraturan perundangan yang berlaku

3. Sosialisasi, edukasi, pelatihan terkait pemberlakuan Aturan Bersama atau aturan lainnya untuk pencegahan kumuh dan Rencana O & P

4. KESIMPULAN

Tahapan keberlanjutan ini diartikan sebagai tahap setelah pelaksanaan lapangan dilakukan meskipun demikian hal tersebut tidak dapat terjadi dengan sendirinya, melainkan harus diupayakan sejak awal proses dari tahapan persiapan, perencanaan dan pelaksanaan dimana didalamnya ada tahapan monitoring dan evaluasi. Upaya keberlanjutan pada program ini diharapkan pada keberlanjutan yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Penyusunan kerangka regulasi
- b. Penguatan Kelembagaan untuk Penganggaran dan Operasional dan Pemeliharaan. Pembangunan lembaga pengelola infrastruktur yang telah dibangun, misalnya penilik sampah, penilik drainase, kebakaran, bangunan, dsb
- c. Pengelolaan Database dan Mekanisme Pemantauan Pelaksanaan Program.

5. SARAN

Kegiatan monitoring dilakukan dengan memanfaatkan system informasi dan GIS yang berbasis website. Sistem informasi mencakup profil kumuh di tingkat kota/kabupaten, kawasan, maupun kelurahan sesuai data hasil survey *baseline* maupun SK kumuh, ringkasan RP2KP-KP dan RPLP, proses dan progress kegiatan peningkatan kualitas maupun pencegahan, hasil-hasil kegiatan infrastruktur, capaian indikator kinerja, maupun informasi kelembagaan, pemrograman maupun penganggaran di tingkat kota/kabupaten. Tahap evaluasi diselenggarakan dengan mengacu pada *baseline* data, hasil monitoring dan survey khusus untuk studi evaluasi. Evaluasi akan memberikan gambaran pencapaian serta rekomendasi sebelum masuk ke siklus selanjutnya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada LPPM

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Muslim, B. 2018. Pelatihan aplikasi editing video dengan filmora., Laporan Pengabdian Kepada Masyarakat, LPPM STT Pagaralam.
- [2] Dardak, A. Hermanto. 2008. Kebijakan Penataan Ruang untuk Pengelolaan Persampahan. Available at <http://www.bappeda.jabarprov.go.id/pdf>.
- [3] **Fatah, Iroh Rohayati** Belajardari Program Sebelumnya Menuju KOTAKU Lebih Baik dalam <http://kotaku.pu.go.id/wartadetil.asp?mid=8354&catid=1&>
- [4] Kamaluddin, Laode. M. 2008. "Penataan Ruang dan Pemanasan Global" dalam Bulletin Penataan Ruang. Available at: www.bulletin.penataanruang.net.
- [5] Utami, Beta Dwi. 2008. Pengendalian Sampah Rumah Tangga Berbasis Komunitas: Teladandari Dua Komunitas di Sleman dan Jakarta Selatan. dalam Jurnal ISSN: 1978-4333, Vol.02, No. 1.
- [6] UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- [7] UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- [8] Isro'Mukti, Y. (2017). Sistem Informasi Madrasah Aliyah Negeri Pagar Alam Berbasis Web. Indonesian Journal of Computer Science, 6(2), 192-205.
- [9] Mukti, Y. (2017). Perencanaan Strategis Sistem Informasi Dan Teknologi Informasi Pada Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Pagar Alam. JURNAL ILMIAH BETRIK: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, 8(02), 83-92.
- [10] Arif, A., & Mukti, Y. (2017). Rancang Bangun Website Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 8 Kota Pagar Alam. JURNAL ILMIAH BETRIK: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, 8(03), 156-165.
- [11] Isro'Mukti, Y. (2018, October). Sistem Informasi Manajemen Aset Sekolah Tinggi Teknologi

- Pagaralam Berbasis Web. In Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Komunikasi (SEMNASITIK) (Vol. 1, No. 1, pp. 632-638).
- [12] Mukti, Y. (2018). Rancang Bangun Website Sekolah Dengan Metode User Centered Design (UCD). JURNAL ILMIAH BETRIK: Besemah Teknologi Informasi dan Komputer, 9(02), 84-95.
- [13] Mukti, Y. (2018). Pelatihan Maintance Komputer SMAN Pagar Gunung. NGABDIMAS, 1(1), 47-51.